

MEKANISME PELAPORAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI
PADA PT SURINDO TEGUH GEMILANG
DI SURABAYA

SKRIPSI

**Sebagai Salah Satu Prasyarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi**



Oleh:

IVAN HIDAYAT WIJAYA
15120017

PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS KATOLIK DARMA CENDIKA
SURABAYA
2019

MEKANISME PELAPORAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI
PADA PT SURINDO TEGUH GEMILANG
DI SURABAYA

SKRIPSI



Oleh:

IVAN HIDAYAT WIJAYA
15120017

PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS KATOLIK DARMA CENDIKA
SURABAYA
2019

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama : Ivan Hidayat Wijaya

NPM : 15120017

Fakultas : Ekonomi

Program Studi : Akuntansi

Judul Skripsi : Mekanis Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai Pada PT Surindo
Teguh Gemilang Di Surabaya

Pembimbing

Tanggal, 16 / 07 / 2019



(Dra. Jeanne Asteria. W, MSi.Ak)

Mengetahui:

Ketua Program Studi

Tanggal, 18 / 07 / 2019



(Nia Yuniarsih, S.E., M.S.A.)

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Judul Skripsi

“Mekanisme Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai Pada PT Surindo Teguh Gemilang di Surabaya”

Telah diuji dan dipertahankan di hadapan

Tim Penguji Dosen

Fakultas Ekonomi Universitas Katolik Darma Chendika

Jurusan Akuntansi

Pada Hari Selasa Tanggal 30 Juli 2019

Disusun Oleh:

Nama : Ivan Hidayat Wijaya

NPM : 15120017

Fakultas : Ekonomi

Jurusan : Akuntansi

Tim Penguji

Nama

1. Nia Yuniarsih, S.E., M.S.A

(Ketua)

2. Dr. Soffia Pudji Estiasih, M.M

(anggota)

3. Dra. Jeanne Asteria Wawolangi, M.Si., Ak.,

(anggota)

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh (Ivan Hidayat Wijaya) dengan NPM. 15120017

Telah diuji pada 30 Juli 2019

Dinyatakan LULUS oleh:

Ketua Tim Penguji:



(Nia Yuniarsih, S.E., M.S.A.)

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ekonomi

Ka. Program Studi,



(Thyophoida WSP, SE, MM)



(Nia Yuniarsih, S.E., M.S.A.)

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : IVAN HIDAYAT WIJAYA

Fakultas/Prodi : Ekonomi/ Akuntansi

Alamat Asli : Krukah Utara No 58 Surabaya

No. Identitas : 3578041808970003

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

“Mekanisme Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai Pada PT Surindo Teguh Gemilang Di Surabaya’

Adalah merupakan hasil Penelitian saya sendiri yang belum pernah dipublikasikan menggunakan hasil penelitian saya secara keseluruhan maupun sebagian dalam skripsi atau bentuk lain yang dapat dipublikasikan secara umum. Skripsi (Tugas Akhir) ini sepenuhnya merupakan Penelitian yang dilakukan dengan menggunakan seluruh sumber dari hasil penelitian yang Penelitian saya dan sesuai kaidah akademik yang berlaku umum, termasuk para pihak perusahaan yang telah memberikan kontribusi pemikiran dan informasi yang sesuai dengan penelitian, kecuali yang menyangkut kalimat dan desain penulisan.

Apabila kemudian hari terbukti bahwa saya ternyata melakukan tindakan menyalin atau meniru tulisan orang lain seolah-olah hasil pemikiran saya sendiri, saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan yang berlaku di Fakultas Ekonomi Universitas Katolik Darma Cendika termasuk pencabutan gelar sarjana.

Demikian pernyataan ini saya nyatakan secara benar dengan penuh tanggung jawab dan integritas.

Surabaya, 16 Juli 2019

Hormat saya,



Ivan Hidayat Wijaya

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya sehingga saya dapat menyelesaikan peneliian dan skripsi yang berjudul :

“MEKANISME PELAPORAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI PADA PT SURINDO TEGUH GEMILANG DI SURABAYA” Skripsi ini merupakan untuk memenuhi salah satu syarat dalam meraih derajat Sarjana Ekonomi program strata 1 (S1) Fakultas Ekonomi Universitas Katolik Darma Cendika.

Selama Penelitian penyusunan dalam skripsi tersebut, peneliti tidak lepas dari banyak kendala dan masalah. Kendala tersebut dapat teratasi penulis berkat adanya bantuan, bimbingan, dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu peneliti ingin menyampaikan rasa terima kasih sebesar – besarnya kepada:

1. Ibu Thyophoida W. S. P, S.E., M.M., selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Katolik Darma Cendika.
2. Ibu Nia Yuniarsih S.E., M.S.A., selaku Ketua Program Studi Akuntansi Universitas Katolik Darma Cendika.
3. Ibu Dra. Jeanne Asteria Wawolangi, M.Si., Ak., selaku Pembimbing dan dosen pembimbing yang banyak membantu dalam melakukan pengerjaan skripsi dan yang juga banyak membantu memberikan masukan di dalam perbaikan skripsi.
4. Kepada PT Surindo Teguh Gemilang yang membantu saya dalam melakukan penelitian tersebut.
5. Selaku Orang Tua dan Kakak Perempuan yang membimbing dan memberikan semangat dalam pengerjaan skripsi
6. Teman-Teman The gings reuni smp yang memberikan semangat untuk saya dalam mengerjakan skripsi
7. Teman- teman Akuntansi angkatan 15 yang meberikan semangat untuk saya dalam proses mengerkan skripsi



Peneliti menyadari bahwa laporan skripsi ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, peneliti membutuhkan saran dan kritik yang membangun untuk pengembangan penelitian berikutnya. Akhir kata, semoga laporan skripsi ini dapat berguna memberikan manfaat bagi banyak pihak yang membacanya

Surabaya, 11 Januari 2019

Peneliti

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR.....	viii
DAFTAR LAMPIRAN	ix
ABSTRAK	x
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah	5
1.3 Tujuan Penelitian	5
1.4 Manfaat Penelitian	5
1.4.1 Manfaat Teoritis	5
1.4.2 Manfaat Praktis	6
1.5 Ruang Lingkup Penelian	7

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori	8
2.1.1 Definisi Pajak	8
2.1.2 Jenis Pajak	9
2.1.3 Fungsi Pajak	11





2.1.4 Asas Pemungutan Pajak.....	11
2.1.5 Cara Pemungutan Pajak	12
2.1.6 Sistem Pemungutan Pajak	13
2.1.7 Wajib Pajak Patuh	14
2.1.8 Pajak Pertambahan Nilai	16
2.1.9 Subjek Pajak Pertambahan Nilai	17
2.1.10 Objek Pajak Pertambahan Nilai.....	18
2.1.11 Barang Kena Pajak	18
2.1.12 Mekanisme Pajak Pertambahan Nilai.....	20
2.1.13 Tarif Dan dasar pengenaan Pajak Pertambahan Nilai	24
2.1.14 Teori Kompensasi Bayar	26
2.1.15 Cara Menghitung Pajak Pertambahan Nilai	26
2.1.16 Pengkreditan Pajak Masukan.....	29
2.1.17 Mekanisme pelaporan pajak pertambahan nilai	32
2.1.18 Pelaporan PPN dengan Menggunakan e SPT	33
2.1.19 Saluran e SPT	35
2.1.20 Sanksi Bagi Keterlambatan dalam melaporkan PPN.....	35
2.1.21 Sanksi Telat Membayar	35
2.1.22 Surat Setoran Pajak	36
2.1.23 Surat Pemberitahuan Massa PPN	36
2.1.24 Isi SPT Massa PPN	39
2.1.25 Manfaat Pajak Pertambahan Nilai	40
2.2 Penelitian Terdahulu	41



2.2.1 Jurnal Penelitian.....	41
2.3 Kerangka Peneilitian	44
BAB III METODELOGI PENELITIAN	
3.1 Obyek Penelitian	45
3.2 Pendekatan Penelitian	45
3.2.1 Pendekatan Peneltian	45
3.2.2 Sumber Data	45
3.3 Teknik Pengumpulan Data.....	46
3.4 Satuan Kajian.....	46
3.4.1 Pajak Pertambahan Nilai	46
3.4.2 Pajak Masukan	47
3.4.3 Pajak Keluaran	47
3.5 Teknik Analisis Data	47
BAB IV HASIL PENELITIAN	
4.1 Gambaran Umum Obyek Penelitian	48
4.1.1 Sejarah PT Surindo Teguh Gemilang	48
4.1.2 Visi dan Misi PT Surindo Teguh Gemilang	49
4.1.3 Struktur Organisasi	49
4.1.4 Deskripsi Jabatan Pada PT Surindo Teguh Gemilang	50
4.2 Deskripsi Hasil Penelitian	54
4.2.1 Pembelian	54
4.2.2 Penjualan	56
4.3 Analisis Data Penelitian.....	58



4.3.1 Perhitungan PPN Terutang	58
4.3.2 Penyetor PPN Terutang	69
4.3.3 Pelaporan PPN Terutang	72

BABV PENUTUP

5.1 Kesimpulan	82
5.2 Saran.....	82

Daftar Pustaka

Lampiran

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Contoh Perhitungan	27
Tabel 2.2 Total Keterlambatan Melaporkan	34
Tabel 2.3 Persamaan dan Perbedaan	41
Tabel 2.4 Persamaan dan Perbedaan	42
Tabel 2.5 Persamaan dan Perbedaan	43
Tabel 4.1 Pembelian	55
Tabel 4.2 Penjualan	57
Tabel 4.3 Data Pembetulan	57
Tabel 4.4 Perhitungan PPN sebelum pembetulan	60
Tabel 4.5 Perhitungan PPN Sesudah pembetulan	60
Tabel 4.6 Penyetoran PPN Terutang 2018	69
Tabel 4.7 Pelaporan PPN Tahun 2018	72



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Contoh Form SSP	35
Gambar 2.2 Contoh Form SPT	38
Gambar 2.3 Kerangka Pemikiran.....	44
Gambar 4.1 Struktur Organisasi PT Surindo Teguh Gemilang	49
Gambar 4.2 Pengisian Database E-SPT	61
Gambar 4.3 Pemilihan Format Penyimpanan SPT	62
Gambar 4.4 Pengisian admin e SPT	62
Gambar 4.5 Penanda tangan e SPT.....	63
Gambar 4.6 Input Data Pada e SPT	63
Gambar 4.7 Faktur Pajak	64
Gambar 4.8 input Data Pajak Masukan dan Pajak Keluaran	64
Gambar 4.9 Transaksi Pajak Masukan dan Pajak Keluaran	65
Gambar 5.0 Penginput Pajak Masukan dan Pajak Keluaran	66
Gambar 5.1 Pemilihan Form SPT	66
Gambar 5.2 Pemilihan Tahun SPT	67
Gambar 5.3 Melakukan Pembuatan Setoran.....	67
Gambar 5.4 Form 1111	68
Gambar 5.5 Input Setoran Pajak	56
Gambar 5.6 Surat Setoran Pajak.....	73
Gambar 5.7 SPT Massa PPN	73
Gambar 5.8 SPT Massa Pengaturan	74
Gambar 5.9 SPT Pembetulan.....	74



Gambar 6.0 Klik SPT	75
Gambar 6.1 Pembetulan 1	75
Gambar 6.2 Edi Pajak Keluaran dan Pajak Masukan	76
Gambar 6.3 Form Daftar Eksport Barang	77
Gambar 6.4 Formulir Daftar barang dalam Negeri	77
Gambar 6.5 Formulir Daftar Pajak Masukan.....	78
Gambar 6.6 form Pajak Masukan	79
Gambar 6.7 Pajak Masukan yang tidak dikreditkan	79
Gambar 6.8 Bukti Pelaporan SPT	80

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 SPT Massa Januari 2018

Lampiran 2 SPT Massa Februari 2018

Lampiran 3 SPT Massa Maret 2018

Lampiran 4 SPT Massa April 2018

Lampiran 5 SPT Massa Mei 2018

Lampiran 6 SPT Massa Juni 2018

Lampiran 7 Formulir 1111

Lampiran 8 Dokumen Penjualan

Lampiran 9 Faktur Pajak

Lampiran 10 Eksport Barang

11 Lampiran Wawancara

12 Lampiran invoice yang di buat pembelian

ABSTRAK

Oleh:
IVAN HIDAYAT WIJAYA

Dari beberapa jenis pajak yang dikenakan kepada warga Negara Indonesia, sebagai salah satu diantaranya yaitu pajak pertambahan nilai (PPN) yaitu pajak yang dikenakan atas pertambahan nilai (PPN) yaitu pajak yang harus dikenakan atas pertambahan nilai barang atau jasa yang di hasilkan atau di serahkan oleh pengusaha kena pajak, baik juga pengusaha yang menghasilkan barang kena pajak (BKP), mengimpor BKP, melakukan suatu usaha perdagangan atau pengusaha yang melakukan usaha di bidang jasa kena pajak (JKP).

PT Surindo Teguh Gemilang merupakan suatu perusahaan yang bergerak dalam bidang industri karton / *Gelombang (KKG)/Corrugated Carton Box* Di Surabaya. Perusahaan tersebut merupakan salah satu perusahaan di Jawa Timur dalam bidang industri karton. Bila perusahaan melakukan pembelian terhadap Barang Kena Pajak (BKP) maka di kenakan Pajak Pertambahan nilai (PPN) masukan dari Dasar pengenaan Pajak (DPP) barang terebut dikenakan PPNInstansi pemerintah, badan-badan tertentu ditunjuk sebagai pemungut PPN. Pengusaha Kena Pajak yang menyerahkan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak kepada pemungut PPN pada saat membuat surat tagihan wajib membuat faktur pajak dan surat setoran pajak.

Pendekatan penelitian ini menggunakan kualitatif deskriptif bentuk studi kasus yang menggambarkan proses perhitungan PPN di PT Surindo Teguh Gemilang untuk ketepatan perhitungan PPN dengan UU PPN yaitu undang-undang No. 42 tahun 2009 dan pelaporan PPN.Solusi dan saran bagian Pembelian harus lebih kompeten dalam memberikan faktur pajak kepada *Accounting* agar tidak terjadi keterlambatan pada saat melaporkan,

Kata Kunci: Mekanisme Pelaporan , Dasar Pajak Pertambahan Nilai ,Pelaporan PPN



ABSTRACT

By:
IVAN HIDAYAT WIJAYA

Of the several types of taxes imposed on Indonesian citizens, one of which is value added tax (VAT), which is a tax imposed on value added (VAT), which is a tax that must be imposed on the value added of goods or services produced or delivered by taxable entrepreneurs, both entrepreneurs who produce taxable goods (BKP), import BKP, conduct a trade business or entrepreneurs who do business in the field of taxable services (JKP)

PT Surindo Teguh Gemilang is a company engaged in the cardboard / wave industry (KKG) / Corrugated Carton Box in Surabaya. The company is one of the companies in East Java in the field of cardboard industry. If the company makes a purchase of Taxable Goods (BKP) then the value added tax (PPN) is imposed on the input from the Tax Base (DPP) of the goods subject to government PPN, certain bodies are designated as VAT collectors. Taxable Entrepreneurs who submit Taxable Goods or Taxable Services to VAT collectors when making bills must make tax invoices and tax deposits.

This research approach uses a qualitative descriptive form of case study that describes the VAT calculation process at PT Surindo Teguh Gemilang for the accuracy of VAT calculations with the VAT Law, namely law No. 42 of 2009 and PPN reporting. The solution and advice of the Purchasing Department must be more competent in providing tax invoices to Accounting so that there is no delay when reporting.

Keywords: *Repoting Mechanism, Value Added Tax, VAT Repoting*



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia menggunakan pajak sebagai sumber utama dalam penerimaan Negara. Penerimaan tersebut berguna untuk pelaksanaan dan peningkatan pembangunan nasional serta bertujuan untuk meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan nasional. Pajak juga digunakan sebagai alat bagi pemerintah dalam mencapai tujuan untuk mendapatkan penerimaan dan pendapatan dengan baik yang bersifat secara langsung maupun tidak langsung dari masyarakat guna membiayai pengeluaran secara rutin, juga meningkatkan pembangunan nasional, ekonomi masyarakat. Sistem perpajakan selalu mengalami perubahan dari masa ke masa sesuai dengan perkembangan masyarakat dan negara, baik dalam bidang kenegaraan maupun dalam bidang sosial dan ekonomi. Pemungutan pajak merupakan suatu bentuk kewajiban setiap warga negara selaku wajib pajak serta berperan aktif dalam membiayai berbagai keperluan negara yaitu berupa pembangunan nasional yang pelaksanaannya telah diatur dalam undang-undang dan peraturan untuk tujuan peraturan dengan tujuan kesejahteraan bangsa dan Negara.

Menurut Soemitro (2009:6-5) Pada Buku Pajak Pertambahan Nilai pajak adalah iuran rakyat kepada Negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat di tunjukkan, dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran



umum. Dari definisi tersebut, disimpulkan bahwa pajak memiliki unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Pajak di pungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang serta aturan pelaksanaannya.
- b. Dalam pembayaran pajak tidak dapat di tunjuk adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.
- c. Pajak dipungut oleh Negara baik pemerintah pusat atau pemerintah daerah
- d. Pajak diperuntukkan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah yang bila dari pemasukannya masih terdapat surplus, digunakan untuk membiayai *public investment*.

Pajak mempunyai fungsi lain yang tidak hanya untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran pemerintah antara lain:

- a. Fungsi sebagai sumber keuangan Negara (*budgetair*) adalah Pajak sebagai salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran baik rutin maupun pembangunan
- b. Fungsi sebagai mengatur (*regulated*) adalah Pajak sebagai alat untuk mengukur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam social dan ekonomi, serta mencapai tujuan-tujuan tertentu di luar bidang keuangan,

Konsep perpajakan yang berlaku di Indonesia saat ini adalah *self assessment system* dimana sistem pemungutan pajak memberi wewenang kepada wajib pajak (WP) dalam menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku



dengan adanya sistem ini, wajib pajak dapat mewujudkan keuntungannya dalam usahanya namun tidak terlepas dari kewajibannya membayar pajak.

Dari beberapa jenis pajak yang dikenakan kepada warga Negara Indonesia, sebagai salah satu diantaranya yaitu pajak pertambahan nilai (PPN) yaitu pajak yang dikenakan atas pertambahan nilai (PPN) yaitu pajak yang harus dikenakan atas pertambahan nilai barang atau jasa yang di hasilkan atau di serahkan oleh pengusaha kena pajak, baik juga pengusaha yang menghasilkan barang kena pajak (BKP), mengimpor BKP, melakukan suatu usaha perdagangan atau pengusaha yang melakukan usaha di bidang jasa kena pajak (JKP). Pada PPN, tidak ada sistem pemungutan berganda karena adanya mekanisme kredit pajak dan tarif pajak yang sama yaitu 10%.

Dalam PPN Tersebut ada dua mekanisme pengkreditan yaitu pajak masukan (PM) yang di bayar oleh pembelian dan pajak keluaran (PK) yang di bayar oleh penjual. Apabila besar pajak keluaran lebih besar dari pada pajak masukan berarti terdapat kekurangan penyetoran, sedangkan apabila pajak keluaran lebih kecil dari pada pajak masukan berarti terdapat kelebihan penyetoran.

PT Surindo Teguh Gemilang merupakan suatu perusahaan yang bergerak dalam bidang industri karton / *Gelombang (KKG)/Corrugated Carton Box* Di Surabaya. Perusahaan PT Surindo Teguh Gemilang tersebut merupakan salah satu perusahaan di Jawa Timur dalam bidang industri karton. Bila perusahaan melakukan pembelian terhadap Barang Kena Pajak (BKP) maka di kenakan Pajak Pertambahan nilai (PPN) masukan dari Dasar pengenaan Pajak (DPP) barang tersebut. bila perusahaan tersebut melakukan penjualan barang, maka perusahaan berhak melakukan pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) keluaran terhadap



Barang kena pajak tersebut. Pajak masukan yang telah disetor dapat di kreditkan dengan pajak keluaran yang telah di pungut. PT Surindo Teguh Gemilang tersebut perusahaan yang bergerak dalam bidang industri karton dan merupakan perusahaan kena pajak (PKP) sebagai perusahaan yang kena pajak, transaksi pembelian PT Surindo Teguh Gemilang Surabaya berasal dari perusahaan – perusahaan yang juga termasuk pengusaha Kena Pajak (PKP) sehingga PPN sehingga PPN masukan yang timbul atas pembelian Barang Kena Pajak (BKP) dapat dikreditkan pada akhir masa pajak.

Masalah yang timbul setelah melakukan penelitian dan wawancara Pada PT Surindo Teguh Gemilang Berdasarkan PPN rekapitulasi penjualan dan pembelian periode masa Januari sampai dengan Juni 2018, dapat dilihat bahwa pelaporan PPN PT Surindo Teguh Gemilang pada setiap bulannya menunjukan adanya kekurangan pembayaran pajak yang cukup besar. Hal ini dapat terjadi karena jumlah PPN keluaran lebih besar dari PPN Masukan dan juga tidak ada resitusi (kelebihan Bayar) sehingga perusahaan harus membayar selisih pemasukan PPN Masukan dan PPN Keluaran yang dilakukan oleh PT surindo Teguh Gemilang. PT surindo Teguh Gemilang juga memiliki masalah agak sedikit terlambat dalam melaporkan PPN dikarenakan Bagian pembelian kurang aktif dalam meminta faktur pajak pembelian supplier sehingga faktur pajak di terima terlambat mengakibatkan pelaporan SPT Masa PPN kadang-kadang tidak sama dengan Faktur pajak yg di terima.

Solusi Masalah dalam penelitian dan wawancara pada PT Surindo Teguh Gemilang semestinya bagian pembelian harus aktif untuk meminta faktur pajak dari supplier. Bagian pembelian harus memberikan faktur pajak pada saat *tax*



accounting melakukan perhitungan, pada PPN (Pajak Pertambahan Nilai) dalam proses Pembayaran atau pencatatanya pelaporan tersebut tidak terlambat dan juga Agar faktur pajak yang dipungut oleh pihak lain /pajak masukan pada Pelaporan tersebut sama sesuai dengan masa pajak yang dilaporkan PT Surindo Teguh gemilang tersebut akan terkena sanksi jika telambat dalam melaporkan PPN sejumlah 2% dari tarif administrasi.

Berdasarkan data tentang Pajak Pertambahan Nilai di atas, peneliti berharap agar penelitian yang dilakukan dapat mampu mengidentifikasi dan memberikan solusi Pelaporan pajak di PT Surindo Teguh Gemilang serta memberikan saran yg di perlukan. Hal ini membuat peneliti tertarik untuk membahas tentang PPN dengan Judul Skripsi **“Mekanisme Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai Pada PT Surindo Teguh Gemilang Di Surabaya”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah diuraikan dalam latar belakang tersebut, maka untuk memudahkan penulis dalam melakukan penelitian yang telah drumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah Mekanisme Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai Pada PT Surindo Teguh Gemilang Di Surabaya?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui cara mekanisme Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai Pada PT Surindo Teguh Gemilang Di Surabaya



1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

- a. Penelitian tersebut diharapkan memberikan pengetahuan dan menambah wawasan bagi perkembangan ilmu ekonomi khususnya dalam bidang perpajakan
- b. Bagi para akademi / mahasiswa mampu pengembangan teori perpajakan (PPN) Pajak Pertambahan Nilai dan juga tidak hanya memahami segi tarif dan undang undang perpajakan tetapi dapat paham dengan tata cara yang sesuai dengan ketentuan undang-undang perpajakan pada PPN.
- c. Meningkatkan kemampuan peneliti dalam menganalisa Fenomena ekonomi yang terjadi pada perusahaan terutama yang berhubungan dengan PPN (Pajak Pertambahan Nilai).

1.4.2 Manfaat Praktis

a. Bagi PT Surindo Teguh Gemilang

Hasil penelitian tersebut dapat memberikan informasi yang bermanfaat bagi perusahaan PT Surindo Teguh Gemilang dalam kepatuhan melakukan pelaporan PPN (Pajak Pertambahan Nilai) pada PT Surindo Teguh Gemilang agar tidak mengalami kerugian.

b. Bagi Lembaga (Universitas Katolik Darma Chendika)

Hasil penelitian ini merupakan tambahan informasi dan referensi bagi pembaca pada umumnya dan bagi mahasiswa dalam Program Studi Akuntansi S1 Universitas Katolik Darma Chendika, dan



diharapkan mampu memberikan kontribusi bagi pengembangan teori yang berkaitan dengan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

c. Bagi Peneliti

Untuk mendapatkan pengalaman dan pengetahuan dalam melakukan penelitian serta melatih diri dalam menerapkan dan mengembangkan ilmu pengetahuan yang telah diperoleh khususnya dalam bidang Perpajakan.

1.5 Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian ini ialah tentang Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai Pada Penjualan dan Pembelian Karton PT Surindo Teguh Gemilang Di Surabaya pembahasan digunakan dalam penggunaan tersebut adalah data penjualan dan pembelian Periode Massa Januari 2018 s/d Juni 2018



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan teori

2.1.1 Definisi Pajak

Teori ini menurut Supromono (2009:7-9) dalam buku perpajakan Indonesia Mekanisme dan Perhitungan Revisi 2009 sebagai berikut:

Pajak Merupakan iuran rakyat kepada Negara. Sifat pemungutan pajak adalah dipaksakan berdasarkan kewajiban yang diatur oleh Undang-Undang beserta aturan pelaksanaannya. fungsi pajak sebagai salah satu sumber penerimaan Negara (fungsi *Budgetair*) bukan merupakan satu-satunya fungsi dari pajak. Masih ada satu lagi fungsi dari pajak yang tidak kalah pentingnya dari fungsi *budgetair*, yaitu fungsi mengatur (*regulair*). Dalam fungsi mengatur, pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur dan melaksanakan kebijakan Negara di bidang sosial dan ekonomi. Misalnya, ada lapisan tarif pajak penghasilan di mana tarif yang tinggi dikenakan untuk penghasilan yang tinggi, pajak yang tinggi untuk minuman keras, tarif pajak yang tinggi yang dikenakan terhadap barang mewah untuk mengurangi gaya hidup konsumtif, tarif Pajak ekspor sebesar 0% untuk mendorong ekspor.

Ekstensifikasi ditempuh untuk melakukan perluasan, baik obyek maupun subyek pajak, sedangkan intensifikasi ditempuh melalui peningkatan kepatuhan subyek pajak yang telah ada. Stelsel pemungutan pajak merupakan tata cara atas pemungutan pajak. Sebagian besar pemungutan pajak di Indonesia Menggunakan self assessment, yaitu suatu sistem pemungutan yang wajib Pajaknya boleh menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus



`disetor. Tulang punggung dari sistem *self assessment system* ini adalah *voluntary compliance* (kepatuhan sukarela), yaitu meletakkan tanggung jawab pemungutan sepenuhnya pada kesadaran wajib pajak. Karena kepatuhan sukarela yang dijadikan tulang punggung maka dalam pelaksanaannya seringkali muncul perlawanan pajak oleh wajib pajak, baik perlawanan pasif maupun aktif. Perlawanan pasif merupakan perlawanan dalam bentuk hambatan yang mempersulit pemungutan pajak. Misalnya, ketidaktahuan Wajib pajak atas suatu kewajiban perpajakan perekonomian yang menyebabkan Wajib Pajak mendapatkan kesulitan untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Perlawanan aktif merupakan perlawanan yang dapat dilihat secara nyata, yaitu dalam bentuk perbuatan secara langsung yang dapat ditujukan kepada aparat pajak dengan tujuan untuk mengurangi Pajak.

2.1.2 Jenis Pajak

Menurut Sukrisno (2009:7-9) Pada Buku Perpajakan Indonesia jenis pajak di bagi kedalam beberapa kelompok antara lain:

1. Menurut sifatnya, pajak dikelompokkan menjadi dua, yaitu sebagai berikut :
 - a. Pajak Langsung adalah pajak yang pembenannya tidak dapat dilimpahkan oleh pihak lain dan menjadi beban langsung wajib pajak (WP) yang bersangkutan. Contoh Pajak Penghasilan (PPh)
 - b. Pajak tidak langsung adalah pajak pembebanannya dapat dilimpahkan kepada pihak lain. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai (PPN), dan Pajak penjualan atas Barang Mewah (PPnBM).



2. Menurut sasaran /objeknya pajak dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu sebagai berikut :
 - a. Pajak Subyektif adalah pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya yang dilanjutkan dengan mencari syarat objektifnya, dalam arti memperhatikan keadaan diri WP. Contoh:PPh
 - b. Pajak Objektif adalah pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada objek tanpa memperhatikan keadaan diri WP. Contohnya PPh,PPN, PPnBM,PBB,BM
3. Menurut pemungutannya, pajak dikelompokkan menjadi dua, yaitu sebagai berikut :
 - a. Pajak Pusat adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah dan di gunakan untuk membiayai rumah tangga pemerintah pusat. Contohnya: PPh,PPN,PPnBM,PBB, dan BM
 - b. Pajak Daerah adalah pajak yang di pungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga pemerintah daerah. Contohnya Pajak Reklame,Pajak Hiburan, Pajak Restoran ,Pajak kendaraan/bermotor



2.1.3 Fungsi Pajak

Berdasarkan definisi pajak yang telah dijabarkan sebelumnya, secara implisit terlihat ada dua fungsi pajak berdasarkan Mardiasmo (2013:1) Pada buku Perpajakan, yaitu:

a. Fungsi Penerimaan (*Budgetary*)

Pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya

b. Fungsi Mengatur (*Regulatory*)

Pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang social dan ekonomi. Contoh: pajak yang tinggi dikenakan terhadap minuman keras untuk mengurangi konsumsi minuman keras, pajak yang tinggi dikenakan terhadap barang-barang mewah untuk mengurangi gaya hidup konsumtif dan tarif pajak untuk ekspor sebesar 0% untuk mendorong ekspor produk Indonesia di pasaran dunia.

2.1.4 Asas Pemungutan Pajak

Dalam memungut pajak dikenal beberapa asas pemungutan perpajakan yaitu (Mardiasmo2011: 7)

1. Asas Domisili

Negara berhak mengenakan pajak atas seluruh penghasilan wajib pajak yang bertempat tinggal di wilayahnya, baik penghasilan yang berasal dari dalam maupun luar negeri. Asas ini berlaku untuk wajib pajak dalam negeri.

2. Asas Sumber



Negara berhak mengenakan pajak atas penghasilan yang bersumber di wilayahnya tanpa memperhatikan tempat tinggal wajib pajak dalam negeri.

3. Asas Kebangsaan

Pengenaan pajak dihubungkan dengan kebangsaan suatu Negara.

2.1.5 Cara Pemungutan Pajak

Cara pemungutan pajak sebagai berikut menurut Mardiasmo (2011:6) dalam buku perpajakan Indonesia:

1. Stelsel Pajak

Dalam stelsel pajak ada 3 cara pemungutan pajak yang dilakukan:

a. Stelsel nyata (*rill stelsel*)

Pengenaan pajak didasarkan pada objek (Penghasilan) yang nyata, sehingga pemungutannya baru dapat dilakukan pada akhir tahun pajak yakni penghasilan yang sesungguhnya telah dapat diketahui kelebihan stelsel ini adalah pajak dikenakan realistis dan kelemahannya adalah pajak baru dapat dikenakan pada akhir periode (setelah penghasilan rill diketahui)

b. Stelsel anggapan (*fictive stelsel*)

Pengenaan pajak berdasarkan suatu anggapan yang diatur oleh undang undang, sebagai contoh penghasilan suatu tahun dianggap di sama dengan tahun sebelumnya sehingga pada awal tahun pajak telah ditetapkan besarnya pajak yang terutang untuk tahun pajak berjalan.



2.1.6 Sistem Pemungutan Pajak

Menurut Waluyo (2010:17) Perpajakan Indonesia Dalam memungut pajak dikenal dengan berbagai sistem pemungutan antara lain:

a. *Self Assessment System*

Self Assessment System merupakan sistem pemungutan pajak yang membebankan penentuan besaran pajak yang perlu dibayarkan oleh wajib pajak yang bersangkutan.

Ciri-ciri sistem pemungutan pajak *Self Assessment*:

1. Penentuan besaran pajak terutang dilakukan oleh wajib pajak itu sendiri.
2. Wajib pajak berperan aktif dalam menuntaskan kewajiban pajaknya mulai dari menghitung, membayar, hingga melaporkan pajak.
3. Pemerintah tidak perlu mengeluarkan surat ketetapan pajak, kecuali jika wajib pajak telat lapor, telat bayar pajak terutang, atau terdapat pajak yang seharusnya wajib pajak bayarkan namun tidak dibayarkan.

b. *Official Assessment System*

Official Assessment System merupakan sistem pemungutan pajak yang membebankan wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang pada fiskus atau aparat perpajakan sebagai pemungut pajak.

Ciri-ciri sistem perpajakan *Official Assessment*:

1. Besarnya pajak terutang dihitung oleh petugas pajak.
2. Wajib pajak sifatnya pasif dalam perhitungan pajak mereka.
3. Pajak terutang ada setelah petugas pajak menghitung pajak yang terutang dan menerbitkan surat ketetapan pajak.



4. Pemerintah memiliki hak penuh dalam menentukan besarnya pajak yang wajib dibayarkan.

c. *Withholding System*

Withholding System adalah, besarnya pajak dihitung oleh pihak ketiga yang bukan wajib pajak dan bukan juga aparat pajak/fiskus. Contoh *Withholding System* adalah pemotongan penghasilan karyawan yang dilakukan oleh bendahara instansi terkait. Jadi, karyawan tidak perlu lagi pergi ke KPP untuk membayarkan pajak tersebut.

Jenis pajak yang menggunakan *withholding system* di Indonesia adalah PPh Pasal 21, PPh Pasal 22, PPh Pasal 23, PPh Final Pasal 4 ayat (2) dan PPN. Sebagai bukti atas pelunasan pajak dengan menggunakan sistem pemungutan pajak ini berupa bukti potong atau bukti pungut.

2.1.7 Wajib Pajak Patuh

Teori ini menurut Siti (2009:138-140) dalam buku perpajakan Indonesia konsep dan Aspek Formal:

Wajib pajak yang patuh adalah Wajib pajak yang taat dan memenuhi serta melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undang perpajakan.

Kepatuhan wajib Pajak dikemukakan sebagai suatu iklim kepatuhan dan keseran dalam pemenuhan kewajiban perpajakan, tercemin dalam suatu situasi dimana:

- a. Wajib pajak paham atau berusaha untuk memahami semua ketentuan peraturan undang-undang perpajakan.
- b. Mengisi formulir pajak dengan lengkap dan jelas



- c. Menghitung jumlah pajak yang terutang dengan benar
- d. Membayar pajak yang terutang tepat pada waktunya.

Ada dua macam kepatuhan yaitu kepatuhan formal dan kepatuhan material.

- a. Kepatuhan formal adalah suatu di wajib pajak memenuhi kewajiban secara formal sesuai dengan ketentuan dalam undang- undang perpajakan.
- b. Kepatuhan material adalah suatu keadaan di mana wajib pajak secara *substantive* atau hakekatnya memenuhi semua ketentuan material perpajakan, yakni sesuai dengan isi dan jiwa undang-undang perpajakan kepatuhan formal.

Kepatuhan merujuk pada kriteria wajib pajak patuh menurut keputusan Menteri Keuangan No.554/KMK.04/2000, bahwa kriteria kepatuhan wajib pajak adalah:

- a. Tepat waktu dalam penyampaian SPT untuk semua jenis pajak dalam dua tahun terakhir
- b. Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali telah memperoleh izin untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak
- c. Tidak pernah dijatuhi hukuman karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan dalam jangka waktu sepuluh tahun terakhir.
- d. Dalam dua tahun terakhir menyelenggarakan pembukuan dan dalam hal terhadap wajib pajak pernah dilakukan pemeriksaan, koreksi pada pemeriksaan yang terakhir untuk masing-masing jenis pajak yang terutang paling banyak lima persen
- e. Wajib pajak yang laporan keuangannya untuk dua tahun terakhir diaudit oleh Akuntans Publik dengan pendapatan wajar tanpa pengecualian, atau



pendapat dengan pengecualian sepanjang tidak mempengaruhi laba rugi fiskal

Masalah kepatuhan wajib pajak adalah masalah yang penting di seluruh dunia, baik Negara maju maupun di Negara berkembang. Karena jika Wajib Pajak tidak penuh makan akan menimbulkan keinginan untuk melakukan tindakan penghindaran, pengelakan, penyelundupan, dan kelalian pajak

Kepatuhan wajib pajak di pengaruhi oleh beberapa faktor yaitu kondisi sistem administrasi perpajakan suatu Negara, pelayanan pada wajib pajak, penegakan hukum perpajakan, pemeriksaan pajak, dan tarif pajak.

2.1.8 Pajak Pertambahan nilai

Menurut Waluyo (2010:422) dalam buku Pajak pertambahan nilai Pajak pertambahan nilai adalah penggenaan pajak atas pengeluaran untuk konsumsi baik yang dilakukan perseorangan maupun badan yang baik badan usaha swasta maupun badan usaha pemerintah dalam bentuk belanja barang dan jasa, yang di bebaskan pada anggaran belanja negara. Berdasarkan objek yang dikenakan pajak pertambahan nilai adalah konsumsi barang dan jasa, maka pajak pertambahan nilai secara bebas dapat diartikan pajak yang dikenakan atas pertambahan nilai barang atau jasa. Secara sistematis pertambahan nilai tambah suatu barang dan jasa dapat di hitung dari niali atau harga penjualan dikurangi niilai atau harga pembelian, sehingga salah satu unsur pertambahan nilai atau nilai tambah suatu barang dan jasa adalah laba yang di harapkan.

Menurut UU No 42 tahun 2009, pajak pertambah nilai (PPN) adalah “pajak yang dikenakan atas konsumsi barang dan jasa di dalam daerah pabean yang dikenakan di setiap jalur produksi dan distribusi”.



Suatu pertambahan nilai tercipta karena untuk menghasilkan menyalurkan, dan memperdagangkan barang ataupun memberikan pelayanan jasa yang, membutuhkan faktor-faktor produksi dan menimbulkan pengeluaran yang dinamakan biaya. Semua biaya inilah yang merupakan pertambahan nilai yang menjadi unsur pengenaan pajaknya. Pada intinya, proses pertambahan nilai selalu timbul karena adanya biaya –biaya yang dikeluarkan mulai dari bahan baku menjadi bahan setengah jadi sampai akhirnya menjadi barang jadi yang siap di jual dengan tingkat yang di harapkan.

2.1.9 Subjek Pajak Pertambahan Nilai

Menurut Wirawan (2010:9) Pada Buku Teori Pajak Pertambahan Nilai PPN merupakan pajak tidak langsung artinya pajak yang pada akhirnya dapat di bebaskan atau dapat di ahliihkan kepada orang lain atau pihak ketiga. pihak-pihak yang mempunyai kewajiban memungut, menyetor, dan melaporkan PPN terdiri atas sebagai berikut:

- a. Pengusaha kena pajak (PKP) yang melakukan penyerahan BKP atau JKP di dalam daerah pabean dan melakukan BKP berwujud/BKP tidak berwujud/JKP
- b. Pengusaha kecil yang memilih untuk dikukuhkan sebagai PKP
- c. Orang pribadi atau badan memanfaatkan BKP atau JKP
- d. Orang pribadi atau badan yang pembangunan rumahnya sendiri dengan persyaratan tertentu.



2.1.10 Objek Pajak Pertambahan Nilai

Sesuai dengan undang-undang No 42 tahun 2009 tentang pajak pertambahan nilai, PPN dikenakan atas.

- a. Barang Kena Pajak di dalam daerah Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha.
- b. Impor Barang Kena Pajak;
- c. Penyerahan Jasa Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha.
- d. Pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean.
- e. Pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean;
- f. Ekspor Barang Kena Pajak Berwujud oleh Pengusaha Kena Pajak.
- g. Ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud oleh Pengusaha Kena Pajak.
- h. Ekspor Jasa Kena Pajak oleh Pengusaha Kena Pajak.

2.1.11 Barang Kena Pajak

1. Barang Kena Pajak (BKP)

Barang Kena Pajak (BKP) adalah barang berwujud yang menurut sifat atas hukumnya dapat berupa barang bergerak atau barang tidak bergerak dan barang tidak berwujud dikenakan pajak berdasarkan undang-undang PPN dan PPnBM. Dalam undang-undang Pajak Pertambahan Nilai pada pasal 4A terdapat pengaturan tentang jenis-jenis barang yang tidak dikenakan PPN meliputi:

- a. barang hasil pertambangan atau hasil pengeboran yang diambil langsung dari sumbernya.



- b. barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh rakyat banyak.
- c. makanan dan minuman yang disajikan di hotel, restoran, rumah makan, warung, dan sejenisnya, meliputi makanan dan minuman baik yang dikonsumsi di tempat maupun tidak, termasuk makanan dan minuman yang diserahkan oleh usaha jasa boga atau catering.

A. uang, emas batangan, dan surat berharga.

2. Jasa Kena Pajak (JKP)

Jasa Kena Pajak (JKP) adalah setiap kegiatan pelayanan berdasarkan suatu perikatan atau perbuatan Hukum yang menyebabkan suatu barang atau fasilitas atau kemudahan atau hak tersedia untuk dipakai, termasuk jasa yang dilakukan untuk menghasilkan barang karena pesanan atau permintaan dengan bahan dan atas petunjuk dari pemesanan, yang dikenakan pajak berdasarkan undang-undang PPN dan PPnBM. Pada pasal 4 A ayat (3) undang-undang PPN telah menetapkan jenis jasa yang tidak dikenakan PPN meliputi:

- a. jasa pelayanan kesehatan medis.
- b. jasa pelayanan social.
- c. jasa pengiriman surat dengan perangko.
- d. jasa keuangan.
- e. jasa asuransi.
- f. jasa keagamaan.
- g. jasa pendidikan.
- h. Jasa kesenian dan hiburan.
- i. Jasa penyiaran yang tidak bersifat iklan.



- j. jasa angkutan umum di darat dan di air serta jasa angkutan udara dalam negeri yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari jasa angkutan udara luar negeri;
- k. Jasa tenaga kerja.
- l. Jasa perhotelan.
- m. Jasa yang disediakan oleh pemerintah dalam rangka menjalankan pemerintahan secara umum.
- n. Jasa penyediaan tempat parkir.
- o. Jasa telepon umum dengan menggunakan uang logam.
- p. Jasa pengiriman uang dengan wesel pos.
- q. Jasa boga atau katering.

2.1.12 Mekanisme Pajak Pertambahan Nilai

Mekanisme PPN Menurut pasal 13 undang-undang pajak pertambahan nilai adalah Menurut (web resmi 2014:9)

1. Pengusaha Kena Pajak wajib membuat faktur pajak untuk setiap :
 - a. Penyerahan barang kena pajak sebagaimana di maksud dalam pasal 4 ayat (1) huruf a atau huruf f dan /atau pasal 16 D
 - b. Penyerahan Jasa Kena Pajak sebagaimana di maksud dalam pasal 4 ayat (1) huruf G
 - c. Eksport Jasa Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) huruf h
- 1.a Faktur pajak sebagaimana dimaksud pada ayat(1) harus di buat pada
 1. saat penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan jasa kena pajak



2. saat penerimaan pembayaran dalam hal penerimaan pembayaran terjadi sebelum penyerahan Barang Kena Pajak dan /atau sebelum penyerahan Jasa Kena Pajak.

3. saat penerimaan pembayaran termin dalam hal penyerahan sebagian tahap pekerjaan, atau

4. saat lain yang diatur dengan atau berdasarkan peraturan menteri keuangan

2. Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pengusaha kena pajak dapat membuat satu faktur pajak meliputi seluruh penyerahan yang dilakukan kepada pembeli Barang Kena Pajak atau penerima jasa kena pajak yang sama selama satu bulan kalender.

a. Faktur pajak sebagaimana pada ayat (2) di buat pada akhir penyerahan

4. Dalam faktur tersebut dicatumkan keterangan tentang penyerahan barang kena pajak dan /atau penyerahan jasa kena pajak yang paling sedikit memuat

a. nama,alamat ,dan Nomor Pokok Wajib Pajak yang menyerahkan barang kena pajak atau jasa kena pajak

b. nama,alamat ,dan Nomor Pokok Wajib Pajak yang menyerahkan barang kena pajak atau penerimaan Jasa Kena Pajak.

c. Jenis barang atau jumlah harga jual atau penggantian dan potongan harga

d. pajak pertambahan nilai yang di pungut

e. Pajak penjualan atas barang mewah yang di pungut



- f. kode, nomor seri, dan tanggal pembuatan faktur pajak.
 - g. nama dan tanda tangan yang berhak menandatangani faktur pajak.
5. Direktur Jendral Pajak dapat menetapkan dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan faktur pajak.
 6. ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembetulan atau penggantian faktur pajak diatur dengan atau berdasarkan peraturan menteri keuangan.
 7. faktur pajak harus memenuhi persyaratan foramal dan material.

Membagi mekanisme pengenaan pajak pertambahan nilai (PPN), yaitu mekanisme PPN secara umum dan mekanisme PPN secara Khusus:

1. Mekanisme PPN secara umum adapun bagian-bagian yang termasuk dalam mekanisme secara umum adalah sebagai berikut:

- a. Pemungutan PPN

Setiap Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang menyerahkan barang kena pajak (BKP) atau Jasa kena Pajak (JKP) wajib memungut PPN Dari pembeli atau menerima BKP dan JKP yang bersangkutan sebesar 10% dari harga jual atau penggantian ,dan membuat faktur pajak sebagai bukti.

- b. Pajak Keluaran (PK)

- c. PPN yang tercantum dalam faktur pajak tersebut merupakan pajak keluaran (ouput Tax) bagi pengusaha kena pajak (PKP) penjual BKP atau jkp yang sifatnya sebagai pajak yang harus di bayar (hutang pajak).

- d. Pajak Masukan (yang dapat dikreditkan).



Pada waktu pengusaha Kena Pajak (PKP) diatas melakukan pembelian atau perolehan Barang Kena Pajak (BKP) atau Jasa Kena Pajak (JKP) yang dikenakan PKP, maka PPN tersebut merupakan Pajak Masukan (input Tax) yang sifatnya sebagai pajak yang di bayar muka, sepanjang Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang di beli tersebut berhubungan langsung dengan kegiatan usahannya dan bukti pemungutnya berupak faktur pajak standart atau diberlakukan sama.

e. Penyetoran PPN yang kurang bayar

Untuk setiap masa pajak (Setiap Bulan), apabila jumlah Pajak Keluar (PK) lebih tinggi dari Pajak Masukan (PM), maka selisihnya disetor ke kas Negara selambat-selambatnya tanggal 30 /31 bulan berikutnya, dan jumlah pajak keluaran lebih tinggi dari Pajak Masukan maka tidak ada restitusi atau dikompensasikan ke masa pajak berikutnya.

f. Pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPN

Pada akhir Masa Pajak, setiap Pengusaha Kena Pajak (PKP) dwajibkan untuk melaporkan pemungutan dan pembayaran pajak yang terutang ke Kantor Pelayanan Pajak setempat selambat-selambatnya tanggl 30-31 setelah akhir masa pajak.

2. Mekanisme PPN secara Khusus

Instansi pemerintah, badan-badan tertentu ditunjuk sebagai pemungut PPN. Pengusaha Kena Pajak yang menyerahkan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak kepada pemungut PPN pada saat membuat surat tagihan wajib membuat faktur pajak dan surat setoran pajak. Pada saat melakukan pembayaran harga jual, penggantian, pemungut pajak yang terutang, kemudian menyetor dengan



menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP) atas nama pengusaha Kena Pajak tersebut dan melaporkannya kepada pengusaha Kena Pajak yang bersangkutan. Pelaporan atas penyerahan kepada pemungut tersebut di SPT masa PPN pada masa pembayaran bukan pada saat penagihan atau penyerahan

2.1.13 Tarif dan Dasar Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai

1. Tarif PPN

Menurut Pasal 7 undang-undang Pajak Pertambahan Nilai diatur tarif pajak sebagai berikut:

- a. Tarif Pajak Pertambahan Nilai adalah 10 % (sepuluh persen)
- b. Tarif Pajak Pertambahan Nilai adalah 0% (nol persen) diterapkan atas:
 1. Ekspor Barang Kena Pajak Berwujud
 2. Ekspor Barang Kena Pajak Tidak berwujud
 3. Ekspor Jasa Kena Pajak
- c. Tarif pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat di ubah menjadi paling rendah 5% (lime Persen) dan paling tinggi 15% (lima belas Persen) yang perubahan tarifnya diatur dengan peraturan pemerintah.

2. Dasar Pengenaan Pajak

Untuk menghitung besarnya pajak yang terutang diperlukan adanya DasarPengenaan Pajak (DPP). Pajak yang harus terutang dihitung dengan cara mengalihkan tarif pajak dengan Dasar Pengenaan Pajak. Dasar Pengganaan Pajak adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh pengusaha karena penyerahan JKP, ekspor JKP atau ekspor BKP tidak berwujud, tetapi tidak termasuk PPN yang dipungut menurut UU PPN dan PPnBM serta



potongan harga yang dicantumkan dalam faktur pajak. Penggantian juga termasuk nilai berupa uang yang dibayar atau seharusnya dibayar oleh penerima jasa karena pemanfaatan JKP dan/atau oleh penerima manfaat BKP tidak berwujud karena pemanfaatan BKP tidak berwujud dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean yang ditetapkan oleh keputusan menteri Keuangan yang digunakan dalam penghitungan pajak yang terutang .

Dalam Menghitung besarnya Pajak yang terutang adalah adanya Dasar Pengenaan Pajak (DPP). Selanjutnya yang dimaksud adalah adanya Dasar Pengenaan Pajak (DPP). Selanjutnya yang dimaksud dengan harga jual, penggantian, nilai ekspor, dan nilai import adalah.

a. Harga Jual

Harga Jual adalah suatu nilai berupa uang termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh penjual Karena penyerahan Barang Kena Pajak tidak termasuk PPN yang dipungut menurut undang-undang PPN dan PPnBM dan potongan harga yang dicantumkan dalam faktur pajak.

b. Penggantian

Penggantian adalah nilai berupa uang termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh pemberi jasa karena penyerahan Jasa Kena Pajak, tidak termasuk pajak yang dipungut menurut undang-undang ini dan potongan harga yang dicantumkan dalam faktur pajak.

c. Nilai Ekspor



Nilai ekspor adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta oleh eksportir. Nilai ekspor dapat diketahui dari dokumen ekspor mialnya harga yang tercantum dalam Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).

d. Nilai Impor

Nilai impor adalah Nilai berupa uang yang menjadi dasar perhitungan bea masuk ditambahn punggutan lainnya yang dikenakan berdasarkan ketentuan dalam peraturan undang-undang pabean untuk import Barang Kena Pajak, tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut menurut undang-undang PPN dan PPnBm

2.1.14 Teori Kompensasi Lebih Bayar

Menurut web resmi kelebihan bayar PPN ini terjadi manakala PKP melaporkan SPT massa PPN diketahui bahwa pajak keluaran. Yang di pungut oleh PKP jauh lebih besar ketimbang pajak masukan, yakni PPN yang di setorkan oleh PKP kepada lawan transaksi atas kelebihan penyetoran PPN ini PKP akan diminta untuk memilih antara melakukan resitusi alias meminta kelebihan tersebut, atau mengkompensasikannya ke massa pajak berikutnya.

2.1.15 Cara Menghitung PPN

1. Cara Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai dengan Dasar Pengenaan Pajak menurut Wirawan Iiyas (2012:45-48) buku Perpajakan Indonesia sebagai berikut.

$$\text{PPN Terutang} = \text{Tarif PPN} \times \text{Dasar Pengenaan Pajak}$$



Pajak pertambahan nilai yang terutang ini merupakan pajak keluaran yang di pungut oleh Pengusaha Kena Pajak. Bagi pengusaha Kena Pajak Pembeli dan Penjualan merupakan pajak masukan yang telah ditanggungkan oleh Perusahaan tersebut.

2. Perhitungan Pajak Keluaran dan Pajak masukan

Pajak Keluaran - Pajak Masukan

Pajak Keluaran di tersebut di gunakan untuk menghitung penjualan dan Pembelian setiap tahunnya pada perusahaan PT Surindo Teguh Gemilang.

Tabel 2.1
Contoh Perhitungan

PT Surindo telah melakukan proses Pajak Keluaran dan Pajak Masukan selama 2018 pada masa PPN dari bulan Januari 2018 s/d Juni 2018 sebagai berikut:

Masa PPN Januari 2018	
Pajak Keluaran Januari 2018	7.567.301.284,00
Pajak Masukan Januari 2018	6.774.344.501,00
	<hr/>
PPN Kurang atau lebih bayar	792.956.783,00
PPN kurang atau lebih bayar spt dibetulkan	811.762.471,00
PPN kurang atau lebih bayar karena pembetulan	18.825.688,00
(Adanya dikompensasikan masa pajak february tahun 2018)	
Masa PPN Februari 2018	
Pajak Keluaran Februari 2018	6.267.236.003,00
Pajak Masukan Februari 2018	4.215.421.190,00
	<hr/>
PPN kurang atau lebih bayar	2.051.814.813,00
PPN lebih bayar SPT di betulkan	2.053.065.403,00
PPN kurang atau lebih bayar karena pembetulan	1.250.490,00
(Adanya lebih bayar dikompensasikan Masa Pajak Bulan maret 2018)	



Masa PPN Maret 2018	
Pajak Keluaran Maret 2018	8.007.462.440,00
Pajak Masukan Maret 2018	6.871.201.155,00

PPN Kurang atau lebih bayar	1.136.261.285,00
PPN lebih bayar SPT di betulkan	1.141.387.623,00
PPN kurang atau lebih bayar karena pembetulan	5.126.336,00

(adanya lebih bayar dikompensasikan Masa Pajak bulan April 2018)

Masa PPN April 2018	
Pajak Keluaran April 2018	8.544.101.798,00
Pajak Masukan April 2018	6.161.030.976,00

PPN kurang atau lebih bayar	2.383.070.822,00
PPN lebih bayar SPT dibetulkan	2.388.638.628,00
PPN kurang atau Lebih bayar karena pembetulan	5.567.806,00

(Adanya dikompensasikan ke masa pajak Mei 2018)

Masa PPN Mei 2018	
Pajak Keluaran Mei 2018	9.287.107.815,00
Pajak Masukan Mei 2018	7.471.831.010,00

PPN kurang atau lebih bayar	1.815.276.805,00
PPN lebih bayar SPT di betulkan	1.922.452.965,00
PPN kurang atau lebih bayar karena pembetulan	107.176.160,00

(Adanya Lebih Bayar Pada Bulan Mei 2018)

Masa PPN Juni 2018	
Pajak Keluaran Juni 2018	5.268.261.667,00
Pajak Masukan Juni 2018	3.831.985.014,00

PPN kurang atau lebih bayar	1.436.276.653,00
PPN lebih bayar SPT di betulkan	1.441.515.519,00
PPN kurang atau lebih bayar karena pembetulan	5.238.866,00

(adanya Kurang bayar pada bulan Juni 2018)

Sumber: SPT PPN PT Surindo Teguh Gemilang



2.1.16 Pengkreditan Pajak Masukan

1. Pengertian Pajak Masukan

Dalam Pasal 1 poin 24 UU No.8 tahun 1983 sebagaimana diubah pada UU No.42 tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai, dinyatakan bahwa Pajak Masukan Adalah Pajak Pertambahan Nilai yang seharusnya sudah dibayar oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP) karena Perolehn Barang Kena Pajak (BKP) dan atau Jasa Kena Pajak (JKP) dan atau pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud dari luar daerah pabean dan impor Barang Kena Pajak. Pengertian diatas menunjukan bahwa pajak masukan timbul karena PKP melakukan pembelian Barang Kena Pajak atau menerima Jasa Kena Pajak.

2. Mekanisme Pengkreditan Pajak Masukan

Menurut sukardji (2010:21-22) mekanisme pengkreditan Pajak Masukan adalah sebagai berikut:

- a. Pajak Masukan yang telah di bayar oleh Pengusaha Kena Pajak pada waktu perolehan atau import Barang Kena Pajak atau penerimaan Jasa Kena Pajak dapt dikreditkan dengan Pajak Keluaran yang dipungut Pengusaha Kena Pajak pada waktu menyerahkan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak pada waktu menyerahkan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak
- b. Pengkreditan Pajak Masukan terhadap Pajak Keluran tersebut harus dlakukan dalam Masa Pajak yang sama.
- c. Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai yang harus dibayar atau disetor ooleh Pengusaha Kena Pajak ke Kas Negara, terlebih dahulu wajib Pajak harus mengurangi Pajak Keluaran dengan Pajak Masukan yang dapat dikreditkan.



d. Apabila dalam suatu Masa Pajak, jumlah Pajak Keluaran Lebih besar dari pada jumlah Pajak Masukan maka selisihnya merupakan PPN yang wajib disetor ke kas Negara.

e. Pajak Masukan yang dapat dikreditkan, tetapi ternyata belum dikreditkan dengan Pajak Keluaran pada Masa Pajak yang sama, dapat dikreditkan pada masa pajak yang bersangkutan sepanjang belum dibebankan sebagai biaya dan belum dilakukan pemeriksaan.

3. Persyaratan umum Pajak Masukan yang Dapat Dikreditkan

Menurut Sukardji (2009:337) mengemukakan persyaratan Pajak Masukan yang dapat dikreditkan sebagai berikut :

a. Persyaratan Formal

a. tercantum dalam Faktur Pajak Standar atau dokumen tertentu yang diperlukan sebagai faktur standar sesuai dengan ketentuan pasal 13 ayat 5 dan Pasal 14 ayat 6 undang-undang PPN.

b. Belum dilakukan pemeriksaan

Apabila dalam suatu pemeriksaan ditemukan Pajak Masukan yang di bayar untuk memperoleh BKP atau JKP yang dapat dikreditkan tetapi belum dilaporkan maka PM tersebut tidak boleh dikreditkan.

c. Pajak Masukan dapat dikreditkan dengan Pajak Keluaran dalam Masa Pajak yang sama atau tidak sama dengan sepanjang belum melampaui bulan ke tiga setelah berakhirnya masa pajak yang bersangkutan.

d. Persyaratan atas kelebihan Pajak Masukan

atas kelebihan Pajak Masukan dapat diajukan permohonan pengembalian pada akhir tahun buku, yang dilakukan oleh :



- a. Pengusaha Kena Pajak yang melakukan ekspor Barang Kena Pajak Berwujud
- b. Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan/ atau penyerahan Jasa Kena Pajak kepada pemungut Pajak Pertambahan Nilai.
- c. Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan Ekspor Barang tidak berwujud
- e. Pengusaha Kena Pajak yang melakukan ekspor Jasa Kena Pajak
- f. Pengusaha Kena Pajak dalam tahap belum diproduksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2a)

5. Pajak Masukan yang tidak Dapat Dikreditkan

Dalam Pasal 9 ayat 8 UU PPN No.42 Tahun 2009, dinyatakan Pajak Masukan yang tidak dapat dikreditkan adalah atas:

- a. Perolehan BKP atau JKP sebelum pengusaha dikukuhkan sebagai pengusaha Kena Pajak.
- b. Perolehan BKP atau JKP yang tidak mempunyai hubungan langsung dengan kegiatan usaha.
- c. Perolehan dan pemeliharaan Kendaraan sedan stasion wagon, kecuali merupakan barang dagangan atau disewakan.
- d. Pemanfaatan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang faktur pajaknya tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat 5 UU PPN (Faktur Pajak).



- e. Perolehan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang faktur pajaknya tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat 5 UU PPN (faktur Pajak).
- f. Pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud atau pemanfaatan Jasa Kena Pajak yang faktur pajaknya tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat 6 UU PPN (dokumen tertentu sebagai faktur pajak).
- g. Perolehan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang pajak masukannya tidak ditagih dengan penerbitan ketetapan pajak
- h. Perolehan barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang pajak masukannya tidak dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan Massa PPN, ditemukan pada waktu pemeriksaan.

2.1.17 Mekanisme Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai

1. Tahap pertama Pelaporan PPN

- a. Melakukan perhitungan Pajak Masukan dan Pajak Keluaran
- b. Pembayaran atau Pelunasan yang dilaksanakan sendiri atau oleh pihak lain dalam satu Massa Pajak yang ditentukan oleh ketentuan peraturan yang di undang-Undang yang berlaku.
- c. Bagi Pemotong atau pemungut untuk melaporkan mempertanggung jawabkan pajak yang di potong oleh atau di punggut lainnya.

2. Tahap Kedua kewajiban melakukan pengisian SPT

- a. Setiap Wajib Pajak wajib mengisi Surat Pemberitahuan dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan huruf Latin, angka satuan



mata uang Indonesia rupiah (Apabila menggunakan bahasa asing harus melalui mengajukan permohonan terlebih dahulu ke Dirjen Pajak) dan menandatangani serta menyampaikan ke kantor Direktorat Jenderal Pajak tempat Wajib Pajak dikukuhkan.

b. Untuk Melakukan pengisian tersebut harus dilakukan melalui E Faktur yang di gunakan dengan Program E filling

c. Pengisian SPT Masa PPN harus dilakukan dengan lengkap, benar dan ditandatangani oleh wajib Pajak.

3. Tahap Ketiga Melakukan Penyampaian SPT

a. Melakukan pelaporan dan penyampaian dengan menggunakan Program E SPT milik dirjen Pajak yang telah ditetapkan sesuai dengan peraturan Pajak pada tahun 2016.

b. melakukan pelaporan dengan menggunakan program E SPT lalu mengubah format csv lalu membuka melewati Program SPT masa Online maka akan terotomatis keluar jurnal penjualan dan Pembelian secara otomatis dari data yang telah akan keluar sesuai dengan yang di ada di E SPT.

2.1. 18 Pelaporan PPN dengan Menggunakan e SPT

PKP yang baru pertama kali melakukan lapor pajak online untuk PPN E-SPT terlebih dahulu di KPP tempat perusahaannya terdaftar. Formulir yang dibutuhkan untuk mengaktivasi EFIN tersebut, bisa diunduh di aplikasi Dirjen Pajak. Selain itu, siapkan juga dokumen-dokumen yang diserahkan berikut:

1. Wajib Pajak Badan

a. Kartu NPWP atau SKT (Surat Keterangan Terdaftar) Wajib Pajak Badan.



- b. Kartu NPWP atau SKT atas nama pengurus yang bersangkutan.
 - c. Kartu identitas diri pengurus (KTP bagi WNI atau KITAS/KITAP bagi WNA).
 - d. Surat kuasa atau penunjukan pengurus yang mewakili dari wajib pajak badan.
 - e. Wajib Pajak Kantor Cabang
2. Kartu NPWP atau SKT (Surat Keterangan Terdaftar) Wajib Pajak Kantor cabang.
 3. Kartu NPWP atau SKT atas Nama pengurus yang bersangkutan.
 4. Kartu identitas diri pengurus (KTP bagi WNI atau KITAS/KITAP bagi WNA).
 5. Surat pengangkatan pimpinan Kantor cabang.
 6. Surat kuasa atau penunjukan pengurus yang mewakili dari wajib pajak badan.

Setelah mendapatkan EFIN Bagi PKP tersebut akan daftarkan sebelum masa kedaluwarsanya di aplikasi E SPT OnlinePajak, agar bisa mendapatkan e-Faktur online, hitung PPN otomatis, mendapatkan SPT Masa PPN yang terisi otomatis , yang semuanya terintegrasi di dalam 1 aplikasi. Masa kedaluwarsa EFIN adalah 30 hari.

2.1.19 Saluran e SPT PPN

Menurut PMK No. 9/PMK.03/2018, wajib pajak dapat menyampaikan SPT Masa Elektronik PPN (SPT Masa 1111) melalui saluran e SPT berikut ini:



- a. Laman Direktorat Jenderal Pajak
- b. Laman penyalur SPT elektronik, seperti aplikasi e SPT OnlinePajak yang merupakan Penyedia Jasa Aplikasi resmi DJP
- c. Saluran suara digital yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak untuk Wajib Pajak tertentu
- d. Jaringan komunikasi data yang terhubung khusus antara Direktorat Jenderal Pajak dengan Wajib Pajak
- e. Saluran lain yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak

2.1.20 Sanksi bagi keterlambatan dalam Melaporkan PPN

Bagi wajib pajak yang terlambat melaporkan SPT pajak akan dikenakan sanksi sebagai berikut:

Tabel 2.2
Total Keterlambatan Melaporkan

No	Jenis Pajak	Tenggat
1	SPT Massa PPN	Rp 500.000,-
2	SPT Massa Lainnya	Rp 100.000,-
3	SPT Tahunan PPh Pribadi	Rp100.000,-
4	SPT Tahunan PPh Lainnya	Rp 1.000.000,-

Sumber: Online Pajak

2.1.21 Sanksi Telat Membayar

Sanksi telat membayar akan dikenakan 2% sesuai dengan Jumlah yang sesuai dengan Jumlah Massa yang dikenakan.


2.1.22 Surat Setoran Pajak (SSP)

(Menurut Web Resmi Pajak) Surat setoran Pajak (SSP) adalah surat yang oleh wajib pajak yang digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran pajak yang tertutang ke kas Negara melalui Kantor Penerima



Pembayaran dan juga fungsi SSP(Surat Setoran Pajak) sebagai sarana untuk membayar pajak dan sebagai bukti dan laporan pembayaran pajak

Gambar 2.1 Contoh Form SSP

 DEPARTEMEN KEUANGAN R.I. DIREKTORAT JENDERAL PAJAK		SURAT SETORAN PAJAK (SSP)		LEMBAR 1 Untuk Anjak Wangi Pajak
NPWP : <input type="text"/>				
Nama WP : <input type="text"/> Data Pengisian Pajak Alamat : <input type="text"/>				
MAP/Kode Jenis Pajak : <input type="text"/>		Kode Jenis Setoran : <input type="text"/>		Urutan Pembayaran : <input type="text"/>
4 1 1 2 1 1		1 0 0		PPN Faktur No : 00000001
Masa Pajak : <input type="text"/>				Tahun : <input type="text"/>
Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Ags Sep Okt Nop Des				2 0 1 2
Nomor Ketetapan : <input type="text"/>				
Jumlah Pembayaran : <input type="text"/>				
Rp. 2.000,-				
Terbilang : Dua Ribu Rupiah				
Diterima oleh Kantor Penerima Pembayaran Tanggal : <input type="text"/>			Wajib Pajak/Penyetor tgl 24 Mei 2012	
Nama Jelas : <input type="text"/>			Nama Jelas : <input type="text"/>	
Ruang Validasi Kantor Penerima Pembayaran				

Sumber: DJP

2.1.23 Surat Pemberitahuan Masa PPN

Menurut Waluyo (2011:31) Surat Pemberitahuan (SPT) adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan pembayaran pajak yang terutang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Menurut Suryarini (2011:155,156) dalam buku pajak di Indonesia yang dimaksud dengan surat pemberitahuan (SPT) masa adalah surat yang oleh wajib pajak yang digunakan untuk melaporkan perhitungan dan/ pembayaran pajak yang terutang dalam suatu masa atau pada suatu saat waktu pembayaran. Surat Pemberitahuan merupakan laporan bulanan yang dapat disampaikan oleh PKP, Mengenai perhitungan:

- Pajak Masukan berdasarkan realisasi pembelian BKP atau direalisasi pembelian BKP atau direalisasikan penerimaan JKP



- b. Pajak Keluaran berdasarkan realisasi pengeluaran BKP/JKP
- c. Penyetoran pajak dan kompensasi

Bagi PKP menyampaikan SPT bersifat:

- a. Wajib Pajak Melaporkan perhitungan pajak tersebut kepada direktorat jendral Pajak (Kantor Pelayanan Pajak).
- b. Dalam jangka waktu 20 hari setelah akhir masa pajak.
- c. Menggunakan Formulir SPT massa
- d. Keterangan dan dokumen yang di cantumkan dan atau dilampirkan pada SPT Massa.
- e. SPT dianggap tidak dimasukan jika tidak atau tidak sepenuhnya melaksanakan ketentuan UU PPN.
- f. Perhatikan juga ketentuan umum dan tata cara perpajakan
- g. Sebagaimana yang sudah ditetapkan dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak, kini SPT Masa PPN disebut juga dengan SPT Masa PPN 1111. Induk SPT Masa PPN 1111, dengan formulir 1111 (F.1.2.32.04) dan Lampiran SPT Masa PPN 1111 terdiri dari:
 - Formulir 1111 AB: formulir Rekapitulasi Penyerahan dan Perolehan (D.1.2.32.07).
 - Formulir 1111 A1: formulir Daftar Ekspor BKP Berwujud, BKP Tidak Berwujud dan/atau JKP (D.1.2.32.08).
 - Formulir 1111 A2: formulir Daftar Pajak Keluaran atas Penyerahan Dalam Negeri dengan Faktur Pajak (D.1.2.32.09).



- Formulir 1111 B1: formulir Daftar Pajak Masukan yang Dapat Dikreditkan atas Impor BKP dan Pemanfaatan BKP Tidak Berwujud/JKP dari Luar Daerah Pabean (D.1.2.32.10).
- Formulir 1111 B2: formulir Daftar Pajak Masukan yang Dapat Dikreditkan atas Perolehan BKP/JKP Dalam Negeri (D.1.2.32.11).
- Formulir 1111 B3: formulir Daftar Pajak Masukan yang Tidak Dikreditkan atau yang Mendapat Fasilitas (D.1.2.32.12).



Gambar 2.2 Contoh SPT

Sumber: PT Surindo Teguh Gemilang

2.1.24 Isi SPT Masa PPN 1111

Berdasarkan PMK Nomor 243/PMK.03/2014, isi SPT Masa PPN harus memuat data sebagai berikut:

- Jenis Pajak.
- Nama wajib pajak serta NPWP-nya.
- Tanda tangan WP atau kuasa dari WP.
- Jumlah penyerahan.
- Jumlah DPP.
- Jumlah pajak keluaran (penjualan).
- Jumlah pajak masukan (pembelian) yang bisa dikreditkan.
- Jumlah kekurangan/kelebihan pajak.



- i. Tanggal penyetoran.
- j. Data lainnya terkait kegiatan usaha wajib pajak/PKP

2.1.25 Manfaat Pajak Pertambahan Nilai

Menurut Darrusallam (2017:29-30) buku Konsep dan Studi Komparasi Pajak Pertambahan Nilai Manfaat Pajak Pertambahan Nilai sebagai berikut:

- a. Sangat mudah untuk mendapatkan nilai tambah di setiap jalur produksi dan distribusi, potensi pemajakan PPN juga semakin besar, dengan menggunakan sistem *tax invoice* (Faktur Pajak), lebih, mudah mengawasi pelaksanaan kewajiban PPN serta mendeteksi penyalagunaan penggunaan pengkreditan pajak masukan dan pajak keluaran.
- b. Sebagai penjual mempunyai kewajiban untuk menerbitkan faktur pajak untuk membuktikan bahwa PPN telah di pungut dan pembeli juga mempunyai kepentingan atas faktur pajak tersebut yang sudah di dibayarnya dapat dikreditkan.



2.2 Penelitian Terdahulu

2.1.1 Jurnal Penelitian dan Perbedaan Penelitian:

1. Diantoro (Kediri, 2016)

Penelitian tersebut dengan judul “Mekanisme Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai Pada PT UNIVERSAL JAYA KEMAS” dengan hasil penelitian Hasil penelitian memberikan kesimpulan bahwa PT UNIVERSAL JAYA KEMAS pada PPN Tersebut terjadi restitusi Pajak karena Pajak Masukan lebih tinggi dari Perolehan Pajak Keluaran tidak ada konpensasi Pembayaran.

Tabel 2.3 Persamaan dan Perbedaan

Perbedaan	Persamaan
1) Penelitian terdahulu tersebut membahas Pajak Pertambahan Nilai yang Pada Pajak Masukannya tersebut lebih tinggi dari pada Pajak keluarannya.	1) Peneliti terdahulu menggunakan judul tentang Pajak Pertambahan Nilai.
2) Penelitian terdahulu menggunakan perusahaan Industri Besi.	2) Peneliti terdahulu menggunakan metode kualitatif.

Sumber: Peneliti

2. Herina, dkk (Jakarta: 2015)

Penelitian tersebut dengan judul “Mekanisme Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai Pada CV Family Di Jakarta” pada tahun 2015 dengan



Hasil penelitian pada CV Family di Jakarta perusahaan tersebut bergerak dalam bidang setiap bulannya menunjukkan adanya kelebihan pembayaran jumlah PPN masukan yang di perolehan lebih besaran dari PPN keluaran secara otomatis perusahaan tersebut mendapatkan restitusi/kelebihan bayar.

Tabel 2.4 Perbedaan dan Persamaan

Perbedaan	Persamaan
1) Penelitian terdahulu menggunakan perusahaan di bidang mebel kayu 2) Perbedaan adanya kelebihan bayar sehingga menimbulkan restitusi atau lebih bayar	1) Penelitian terdahulu membahas pengenaan PPN Pajak keluaran dan Pajak Masukan. 2) Penelitian terdahulu menggunakan metode kualitatif

Sumber : Peneliti

3.Sabijono,dkk.(Yogyakarta:2016) Penelitian yang dilakukan oleh Sabijono, dengan “Mekanisme Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai PT Aneka Dharma Persada Di Yogyakarta” tujuan penelitian tersebut adalah untuk melihat Permasalahan Pajak Pertambahan Nilai Penjualan dan Pembelian Tahun 2016 Pada permasalahan tersebut Pajak Keluaran lebih besar dari Pajak Masukan sehingga Perusahaan tersebut tidak mendapatkan resitusi atau pengembalian kelebihan bayar.



Tabel 2.5 Perbedaan dan Persamaan

Perbedaan	Persamaan
1) Penelitian terdahulu tersebut menggunakan perusahaan mesin. 2) Penelitian terdahulu menggunakan objek perusahaan di bidang konstruksi	1) Penelitian terdahulu membahas pengenaan PPN Pajak Keluaran dan Pajak Masukan. 2) Penelitian terdahulu menggunakan metode kualitatif

Sumber : Peneliti



2.3 Rerangka Penelitian

Gambar 2.3

RERANGKA PENELITIAN

